

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Mesir telah menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sejak tahun 1922, setelah kemerdekaannya dari Inggris. Hubungan yang dijalin berdasarkan kepentingan bersama dalam proses perdamaian dan stabilitas Timur Tengah, revitalisasi ekonomi Mesir dan memperkuat hubungan perdagangan, dan mempromosikan keamanan regional. Amerika Serikat telah menjadi mitra penting Mesir dalam memastikan stabilitas regional dan pada berbagai isu keamanan bersama, termasuk perdamaian Timur Tengah dan melawan terorisme.<sup>1</sup>

Hubungan Mesir – Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Husni Mubarak telah berkembang dan bergerak menuju persahabatan bilateral yang independen.<sup>2</sup> Di bawah kepemimpinan Presiden Mubarak, Mesir memainkan peran pentingnya yaitu sebagai negara moderat di Timur Tengah, dan biasanya mengikuti kebijakan Amerika Serikat tentang isu-isu regional. Mesir bergabung dengan Amerika Serikat dalam mendukung Fatah atas Hamas di Palestina. Selain itu, kedua negara tersebut juga telah meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> U.S. Department of State Diplomacy in Action —*U.S. Relations with Egypt* dapat dilihat di <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm> diakses pada 26 September 2016.

<sup>2</sup> J.M. Sharp, 'Egypt: Background and U.S. Relations', *CRS Report for Congress*, 26 February 2013, <[www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf)>, diakses pada 26 September 2019.

<sup>3</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik, Edisi ke-2* (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2011), hal. 15.

Presiden Husni Mubarak yang telah berkuasa di Mesir selama 30 tahun (1981-2011) dengan sistem otoriternya dituntut untuk mundur dari jabatannya melalui revolusi pada tahun 2011 yang ditandai dengan aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Mesir. Setelah demonstrasi selama 18 hari, akhirnya pada 11 Februari 2011 Husni Mubarak mundur dari jabatannya<sup>4</sup> dan rakyat Mesir akhirnya menikmati euforia demokrasi di negaranya. Revolusi yang menimpa Mesir pada tahun 2011, diyakini juga terdapat keterlibatan IM.

Setelah Presiden Husni Mubarak tumbang dari jabatannya, Mesir menyelenggarakan pemilihan umum presiden (pilpres) selama dua hari berturut-turut pada 23 dan 24 Mei 2012.<sup>5</sup> Pemilihan presiden Mesir pada tahun 2012 adalah pemilihan yang kedua dalam sejarah Negara ini. Jajak pendapat pertama presiden Mesir terjadi pada tahun 2005 yang memenangkan Mubarak.

Dari hasil pemungutan suara pemilihan Presiden putaran pertama di Mesir pada 23-24 Mei 2012 tidak ada calon yang berhasil mendapat suara mayoritas. Kandidat dari Ikhwanul Muslimin Muhamad Mursi meraih 24,78 persen suara, Ahmad Shafiq, seorang mantan Menteri di era Husni Mubarak memperoleh 23,66 persen suara; Hamdeen Sabahi berada di peringkat ketiga dengan 20,72 persen suara; Abdel Moneim Abdol Fotouh meraih 17,47 persen suara, seorang Islamis moderat yang didukung oleh sebagian kaum liberal, anggota kelompok kiri dan minoritas Kristen; sedangkan kandidat Amr Moussa, mantan kepala Liga Arab dan menteri luar negeri

---

<sup>4</sup> Aljazeera.com *Timeline: Egypt's revolution* dapat dilihat di <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html> diakses pada 14 Oktober 2019

<sup>5</sup> Bbc.co.uk *Guide to Egyptian presidential election* dapat dilihat di <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18115104> diakses pada 13 Oktober 2019

era Mubarak hanya memperoleh 11,13 persen suara. Karena tidak ada pemenang mutlak, kandidat dari IM, Muhammad Mursi dan mantan menteri di era Mubarak, Ahmed Shafiq harus mengikuti pemilu putaran kedua.<sup>6</sup>

Pada pemilihan Presiden putaran kedua kandidat Presiden Mesir dari Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), Muhammad Mursi, meraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden yang digelar pada 16-17 Juni 2012. Berdasarkan hasil penghitungan suara sementara, calon dari partai yang menjadi sayap politik IM ini meraih sedikitnya 52,5 persen suara, dari sekitar 50 juta warga Mesir yang berhak memilih.<sup>7</sup>

Pelantikan Muhammad Mursi, mencatat sejumlah sejarah baru di Mesir. Pertama, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden yang dipilih melalui proses yang demokratis. Kedua, inilah kali pertama tokoh IM menjadi orang nomor satu di Mesir, sejak organisasi tersebut didirikan Hasan al-Banna pada 84 tahun silam. Ketiga, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden berlatar belakang sipil, sejak negara itu berbentuk republik pada 1952. Presiden Mursi merupakan presiden kelima di era republik. Empat presiden sebelumnya berlatar belakang militer, yaitu Muhammad Naguib (1953-1954), Gamal Abdul Nasser (1956-1970), Anwar Sadat (1970-1981), dan Husni Mubarak (1981-2011).

---

<sup>6</sup> Huffingtonpost.com *Egypt Presidential Election 2012: Mohammed Morsi, Ahmed Shafiq In Run-Off Vote*. [http://www.huffingtonpost.com/2012/05/28/egypt-presidential-election-2012\\_n\\_1550483.html](http://www.huffingtonpost.com/2012/05/28/egypt-presidential-election-2012_n_1550483.html), diakses pada 14 Oktober 2019.

<sup>7</sup>TheGuardian.com *Muslim Brotherhood's Mohammed Morsi wins Egypt's presidential race* dapat dilihat di <http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2012/jun/24/egypt-election-results-live> diakses pada 13 Oktober 2019.

Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir membuat banyak pihak mengira bahwa politik luar negeri Mesir akan mengalami perubahan besar. Sokongan kuat IM di belakang Presiden Mursi dipandang akan mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Mesir untuk lebih kontra terhadap Israel dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. IM adalah sebuah pergerakan yang secara konsisten tidak tunduk pada Barat khususnya Amerika Serikat, hal ini disebabkan hubungan yang terjalin antara IM dan Barat berorientasi pada keuntungan.<sup>8</sup> IM menjadikan Islam sebagai jalan dan sistem yang komprehensif<sup>9</sup> dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan maupun yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia seperti: sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya.

Kemenangan IM pada pemilihan umum Mesir seakan memberikan bayangan akan terjadinya perubahan ekstrim politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. Akan tetapi, bayangan tersebut sirna ketika Presiden Mursi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB pada 26 September 2012 menyatakan bahwa Mesir tidak akan merubah politik luar negeri Mesir secara drastis, khususnya terhadap Amerika Serikat, antara lain Mursi tetap memegang teguh perjanjian Camp David yang terjalin antara Israel dan Mesir atas prakarsa Amerika Serikat.<sup>10</sup> Lebih jauh lagi, Presiden Mursi juga berkomitmen untuk terus menjaga hubungan bilateral dengan

---

<sup>8</sup> Benny Morris. *One State, Two State: Resolving the Israel/Palestine Conflict*. New Heaven: Yale University Press. 2009. Hal. 32-33.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhwi, *Menyatukan Pikiran para Pejuang Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hal. 63.

<sup>10</sup> Scott Paulson, CBS New York, President Obama Support Egypt's President-elect Mohammed Morsi, 25 Juni 2012, diakses dalam <http://newyork.cbslocal.com/2012/06/25/president-obamasupports-egypts-president-elect-mohammed-morsi/> diakses pada 26 September 2019.

Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat, misalnya, dari pertemuan antara Presiden Mursi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang membahas tentang prospek kerja sama antara kedua negara.<sup>11</sup>

Keharmonisan hubungan antara kedua negara semakin tampak jelas ketika Amerika Serikat tetap memberlakukan kebijakan pemberian bantuan ekonomi dan militer kepada Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi.<sup>12</sup> Jumlah bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Mesir adalah US\$ 1,302,233,562 untuk bantuan militer dan US\$ 90,260,725 bantuan ekonomi dengan jumlah total bantuan yang diberikan sebesar US\$ 1,392,494,287.<sup>13</sup> Presiden Muhammad Mursi juga tetap memilih untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Mesir, juga pinjaman yang dilakukan oleh Presiden Mursi terhadap IMF. Keseluruhan paket kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa kepemimpinan Mesir di bawah Mursi masih berkeinginan untuk membangun kerjasama yang baik dengan Amerika Serikat, meskipun sebelumnya Mursi adalah kader IM yang dikenal bertentangan dengan Amerika Serikat. Namun setelah meraih kekuasaan ternyata realitas-realitas politik yang dihadapi oleh Mursi berhasil melunakkan perilakunya untuk lebih bersahabat dengan Amerika Serikat.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> 'Clinton dan Morsi Bahas Hubungan AS-Mesir,' *VOA Indonesia*, <<http://www.voaindonesia.com/content/clinton-dan-morsi-bahashubunganasmesir/1514980.html>>, diakses pada 26 September 2019.

<sup>12</sup> J.M. Sharp, 'Egypt: Background and U.S. Relations', *CRS Report for Congress*, 26 February 2013, <[www.fas.org/sfp/crs/mideast/RL33003.pdf](http://www.fas.org/sfp/crs/mideast/RL33003.pdf)>, diakses pada 26 September 2019.

<sup>13</sup> U.S. Overseas Loans and Grants, Obligations and Loan Authorizations, July 1, 1945- September 30, 2017, and Congressional Budget Justifications (FY2018-FY2020).

<sup>14</sup> Scott Paulson, CBS New York, President Obama Support Egypt's President-elect Mohammed Morsi, 25 Juni 2012, diakses dalam <http://newyork.cbslocal.com/2012/06/25/president-obamasupports-egypts-president-elect-mohammed-morsi/> diakses pada 26 September 2019.

Merupakan suatu hal yang menarik untuk menggambarkan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Muhammad Mursi sementara Mursi didukung oleh IM yang dikenal luas berseberangan dengan Amerika Serikat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mesir telah menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sejak tahun 1922. Hubungan bilateral kedua negara ini semakin erat terutama pada masa pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Setelah presiden Husni Mubarak tumbang dari jabatannya, Mesir mengadakan Pemilihan Presiden dan terpilihlah Muhammad Mursi dari partai FJP yang disokong oleh IM. Ini merupakan kali pertama IM yang berseberangan dengan Amerika Serikat memegang kekuasaan dalam pemerintahan Mesir. Terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir pertama yang berasal dari kalangan sipil dan IM membuat banyak pihak mengira bahwa politik luar negeri Mesir akan mengalami perubahan besar. Namun ternyata Muhammad Mursi tetap memegang teguh perjanjian Camp David yang terjalin antara Israel dan Mesir atas prakarsa Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, Presiden Mursi juga berkomitmen untuk terus menjaga hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari pertemuan antara Presiden Mursi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang membahas tentang prospek kerja sama antara kedua negara juga. Berangkat dari fenomena di atas, penulis berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Muhammad Mursi.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi ?.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pasca terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu menjelaskan kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa Presiden Muhammad Mursi.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampu menjadi sumber rujukan di dalam penelitian serupa terkait kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa Presiden Muhammad Mursi.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pertama berjudul *“Egypt Foreign Policy under Mohammed Morsi: Domestic Considerations and Economic Constraint”* yang ditulis oleh Janis



Grimm dan Stephen Roll.<sup>15</sup> Tulisan ini secara umum membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fokus politik luar negeri Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi. Pada awal tulisannya, Grimm dan Roll menyebutkan bahwa politik luar negeri Mesir di bawah pimpinan Mursi berfokus pada penegasan peranan Mesir sebagai pemimpin di kawasan Timur Tengah dan pembukaan hubungan luar negeri dengan banyak negara. Melalui pendekatan politik domestik dan metode *causal explanation*, Grimm dan Roll menyimpulkan bahwa politik luar negeri Mesir pada masa kepemimpinan Mursi dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi dalam negeri dan kebutuhan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Mesir pasca revolusi.

Kontribusi tinjauan pustaka pertama dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai faktor penting dalam penetapan kebijakan luar negeri Mesir. Perbedaan tulisan pada tinjauan pustaka pertama dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis berfokus pada kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada era Muhammad Mursi.

Tinjauan pustaka kedua berjudul "*Mubarak Matters: The Foreign Policy of Egypt Under Hosni Mubarak*" yang ditulis oleh Eric Fillinger. Dalam tulisan tersebut, Fillinger berupaya mengidentifikasi faktor penting dalam penetapan kebijakan luar negeri Mesir. Dengan memakai metode *cross case study* dan pendekatan neorealisme, tulisan Fillinger menghasilkan kesimpulan bahwa politik

---

<sup>15</sup>J. Grimm & S. Roll, *Egyptian Foreign Policy under Mohammed Morsi*, Stiftung Wissenschaft and Politik German Institute for International and Security Affairs. C 35.

luar negeri Mesir sangat dipengaruhi oleh keinginan Husni Mubarak dalam menjaga *power* dan pengaruh Mesir di kawasan Timur Tengah.<sup>16</sup>

Kontribusi tulisan pada tinjauan pustaka kedua dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang konstelasi politik Mesir yang di dalamnya memuat prediksi akan berbagai kemungkinan arah politik luar negeri Mesir pasca revolusi dan prospek perdamaian di kawasan Timur Tengah serta memberikan gambaran mengenai beberapa kemungkinan konstelasi politik Mesir pasca revolusi. Perbedaan tulisan pada tinjauan pustaka kedua dengan tulisan penulis adalah penulis lebih fokus pada perubahan kebijakan luar negeri terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Muhammad Mursi dan tulisan penulis bersifat eksplanatif.

Tinjauan pustaka ketiga berjudul “*The Egyptian Military’s Role In The 25 January Revolution, And The Post-Revolution Impacts On Egypt’s Foreign Relations And Middle East Stability*” yang ditulis oleh Major Ehab Elsayed Elhadad.<sup>17</sup> Dalam salah satu sub pembahasan tulisan ini menjelaskan tentang hubungan Mesir - Israel yang sudah terjalin sejak 1948 menunjukkan adanya ketidakstabilan dan berada pada tingkat ketegangan yang tinggi.<sup>27</sup> Hubungan kedua negara tersebut ditengahi oleh Amerika Serikat yang berujung pada kesepakatan damai melalui Perjanjian Camp David tahun 1979. Perjanjian tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi harmonis dalam bidang politik maupun ekonomi.

Menurut Major Ehab, setelah revolusi yang terjadi di Mesir pada tahun 2011

---

<sup>16</sup> Eric Fillinger, *Mubarak Matters: The Foreign Policy of Egypt Under Hosni Mubarak*. School of International Service American University. 2009.

<sup>17</sup> Major Ehab Elsayed Elhadad, *The Egyptian Military’s Role In The 25 January Revolution, And The Post-Revolution Impacts On Egypt’s Foreign Relations And Middle East Stability*, (Fort Leavenworth: Kansas, 2012)

lalu, Israel mengalami kekhawatiran akan nasib dari perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan adanya pergantian rezim yang dihasilkan setelah revolusi, yaitu berakhirnya rezim Mubarak dan terpilihnya Mursi sebagai presiden baru Mesir. Kekhawatiran Israel terhadap status Perjanjian Camp David dalam pandangan pemerintah yang baru berdasarkan pada tiga kategori, yaitu:

1. Keinginan pemerintah Mesir untuk mengakhiri perjanjian tersebut,
2. Keinginan pemerintah Mesir untuk merevisi beberapa poin dalam perjanjian tersebut,
3. Keinginan pemerintah Mesir untuk terus berkomitmen menjalani perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

Dari faktor-faktor tersebut, Major Ehab menilai permasalahan Israel dengan Palestina menjadi permasalahan sensitif yang membuat opini publik di Mesir mengarahkan pandangannya untuk mengakhiri perjanjian Camp David. Selain itu, pandangan publik Mesir pula tertuju pada upaya untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah yang selama ini terus berada dalam ketegangan, khususnya dalam konflik Palestina-Israel.<sup>19</sup>

Kontribusi tulisan dalam tinjauan pustaka ketiga terhadap penelitian ini adalah menjelaskan peran militer Mesir dalam revolusi pada tanggal 25 Januari tahun 2011 dan pasca revolusi serta dampaknya terhadap hubungan luar negeri Mesir dan Timur Tengah. Perbedaan tulisan pada tinjauan pustaka ketiga dengan tulisan penulis adalah tulisan penulis berfokus pada peran elit yang dalam hal ini yaitu Presiden

---

<sup>18</sup> Major Ehab, hal. 63

<sup>19</sup> Major Ehab, hal. 64

Muhammad Mursi dalam mengambil kebijakan luar negerinya.

Tinjauan pustaka keempat berjudul "Faktor Kontinuitas Politik Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika Serikat Pasca Revolusi 2011" yang ditulis oleh Hafid Adim Pradana.<sup>20</sup> Tulisan ini menganalisis faktor kontinuitas politik luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pasca revolusi 2011 dengan menggunakan teori realisme neoklasik. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan luar negeri Mesir selama masa pemerintahan Muhammad Mursi terhadap Amerika Serikat. Hal ini dipengaruhi oleh struktur internasional yang kemudian berdampak pada posisi Mesir yang bertindak sebagai penyangga keadaan damai di Timur Tengah yang pada gilirannya mempengaruhi terjadinya dinamika politik domestik yang membuat Mursi Mesir memutuskan untuk tidak mengubah kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat.

Kontribusi tulisan dalam tinjauan pustaka keempat dalam penelitian penulis adalah menjelaskan analisis teori realisme neoklasik dalam menganalisis konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat setelah revolusi 2011. Dalam hal ini penulis melihat struktur internasional Mesir sebagai Negara penyangga keadaan damai di Timur Tengah mempengaruhi terjadinya dinamika politik domestik yang membuat Mesir memutuskan untuk tidak mengubah kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat. Perbedaan tulisan pada tinjauan pustaka keempat dengan tulisan penulis adalah tulisan penulis berfokus pada analisis faktor yang mempengaruhi konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat

---

<sup>20</sup> Hafid Adim Pradana, Faktor Kontinuitas Politik Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika Serikat Pasca Revolusi 2011, **Dauliyah**, Vol. 2, No. 1, Januari 2017

pada masa pemerintahan Muhammad Mursi yang dilihat dari dua faktor, yaitu faktor eksternal berupa struktur internasional dan distribusi kekuasaan serta factor internal berupa struktur domestik, konsensus elit dan kerapuhan rezim / pemerintah.

Tinjauan Pustaka terakhir berjudul “Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir (2012-2013)” yang ditulis oleh Linda Nur Ramly dan RR. Teery Irenewaty.<sup>21</sup> Tulisan ini menjelaskan latar belakang kehidupan Muhammad Mursi, mendeskripsikan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri serta luar negeri yang diterapkan ketika menjabat sebagai Presiden Mesir, serta memberikan analisis tentang pengaruh atau dampak kebijakan politik Muhammad Mursi terhadap perkembangan politik Mesir. Dengan menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo. Hasil analisis menunjukkan: Muhammad Mursi dididik kedua orang tuanya untuk hidup mandiri dan penuh tanggungjawab, serta rasa cinta terhadap pendidikan terutama agama. Hal ini membentuk kepribadian yang mandiri, bertanggungjawab, dan sangat sederhana. Sikap itu tidak hilang setelah menjadi Presiden Mesir. Fokus utama kebijakan dalam negeri adalah menstabilkan kembali kondisi Mesir sedangkan kebijakan luar negeri adalah mengambil arah politik yang berbeda dengan sebelumnya. Kepemimpinannya membawa Mesir kearah warna politik baru di bawah kubu Islamis dan sipil. Dalam politik luar negerinya, Mesir kembali memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab meski harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel.

---

<sup>21</sup> Linda Nur Ramly dan RR. Teery Irenewaty. Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden Mesir (2012-2013). Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol.12, No. 2, hal. 92-99. 2015. <https://journal.uny.ac.id/index.php/sosial/article/download/>, diakses pada 26 September 2019

Kontribusi tulisan dalam tinjauan pustaka terakhir terhadap penelitian penulis adalah mendeskripsikan latar belakang kehidupan Muhammad Mursi, kebijakan-kebijakan politik dalam negeri serta luar negeri yang diterapkan ketika menjabat sebagai Presiden Mesir, serta memberikan analisis tentang pengaruh atau dampak kebijakan politik Muhammad Mursi terhadap perkembangan politik Mesir. Perbedaan yang penulis dapatkan dari tulisan diatas dengan penelitian ini adalah fokus kajian dalam penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai kebijakan luar negeri Presiden Muhammad Mursi yang memilih untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat meskipun ia disokong oleh IM. Oleh karena itu di dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Muhammad Mursi tetap konsisten dengan menggunakan perspektif realisme neo-klasik.

### **1.7. Kerangka Teori**

#### **Realisme Neoklasik**

Dalam penelitian ini, perspektif realisme neoklasik digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan alasan politik luar negeri Mesir dibawah rezim Muhammad Mursi yang tetap konsisten dalam menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Realisme Neoklasik merupakan salah satu varian dari Realisme. Perspektif realisme neoklasik ini dapat dikatakan sebagai perspektif yang menyempurnakan pendekatan realisme dan neorealisme dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang mengkombinasikan elemen sistem, struktur dan politik

domestik, serta faktor material dan ideasional untuk menganalisa hubungan internasional dari perspektif yang plural.<sup>22</sup>

Seperti yang ditulis oleh Gideon Rose dalam jurnalnya yang berjudul “*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*”, perspektif ini menggabungkan komponen domestik internal dan lingkungan eksternal. Pada jurnalnya tersebut, Rose mendukung pernyataan bahwa terdapat tujuan rasional di dalam suatu pengambilan kebijakan luar negeri yang tidak dapat dipisahkan untuk melihat faktor perilaku negara.<sup>23</sup> Analisis mengenai kekuatan negara harus dilihat dari dua sisi, tidak hanya interaksinya dengan aktor lain di lingkungan eksternal namun juga melihat hubungan negara dengan masyarakatnya, karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada pembagian sumber daya nasional dan kepentingan nasional untuk menganalisis politik luar negeri suatu negara.<sup>24</sup> Perspektif ini dengan kata lain menerangkan bahwa pentingnya mengambil suatu kebijakan berdasarkan kepentingan nasional negara. Sehingga variabel domestik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perspektif ini.

Penulis memilih perspektif realisme neoklasik sebagai pisau analisis diakrenakan perspektif ini merupakan perspektif yang menjelaskan secara kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara yang dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Realisme neoklasik juga merupakan multi-level analisis yang menggabungkan faktor internasional dan

---

<sup>22</sup> Kitchen, Nicholas. 2010. ‘Systemic Pressures and Domestic Ideas: A Neoclassical Realist Model of Grand Strategy Formation’, *Review of International Studies*, Vol. 36, No. 1, pp. 117-143, hal. 119.

<sup>23</sup> Gideon Rose, *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*, *World Politics*, vol. 51, no. 1, (October 1998), United Kingdom : Cambridge University Press, pp. 146-147

<sup>24</sup> Gideon Rose, hal. 147

domestik dapat menghubungkan pengaruh dari faktor sistemik terhadap pertimbangan domestik untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri. Realisme neoklasik mengidentifikasi perhitungan dan persepsi elit dalam kekuatan relatif dan kendala domestik sebagai variabel intervening di antara tekanan internasional dan kebijakan luar negeri negara.<sup>25</sup>

### 1.7.1 Faktor Eksternal

Hal mendasar yang dikemukakan dari realisme neoklasik adalah kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari struktur internasional sebagai faktor eksternal. Pembentukan kebijakan luar negeri memang dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu struktur internasional dan *distribution of power*. Realisme neoklasik mengakui pentingnya posisi negara dalam sistem anarki internasional untuk melihat perilaku yang dihasilkan negara. Penganut realisme neoklasik berpandangan bahwa ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara didorong oleh posisi negara tersebut dalam sistem internasional dan secara khusus ditentukan berdasarkan kapabilitas kekuatan material relatif.

#### 1. Struktur Internasional

Menurut realisme neoklasik, perilaku negara ditentukan oleh struktur internasional. Struktur internasional pada saat ini berada dalam kondisi ketidakadaan *government above the states*, maka keadaan anarki yang menentukan perilaku setiap aktor-aktornya, yaitu state. Dalam hal ini realisme neoklasik berpandangan bahwa dimungkinkan adanya kerjasama didalam sistem yang anarki namun *relative gain*

---

<sup>25</sup> Steven E Lobell, Norrin M. Ripsman, dan Jeffrey W. Taliaffero. 2009. Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. New York: Cambridge University Press, hal. 28

adalah tujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya bukan *absolute gain*, karena dalam suatu kerjasama dalam sistem anarki tidak ada badan supranasional yang bisa memberikan jaminan bahwa anggotanya tidak melakukan kecurangan. Maka dengan demikian negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut tidak akan rela apabila negara lain mengambil keuntungan yang lebih besar dari apa yang didapatkan, terutama bagi negara-negara yang memiliki power kuat, dia akan mempertahankan kondisi anarki dan kerjasama yang sedemikian, karena ia diuntungkan.

## 2. Distribusi kekuasaan (Distribution of Power)

Realisme Neoklasik berpendapat bahwa politik adalah sebuah perjuangan tanpa henti di antara negara-negara berbeda demi *material power* dan keamanan di dunia yang langka akan sumber daya dan kesimpangsiuran.. Perspektif ini melihat bahwa negara cenderung merespon ketidak pastian anarki internasional dengan berusaha untuk mengontrol dan membentuk lingkungan eksternal mereka. Negara merespon lingkungan eksternal mereka melalui bagaimana tekanan sistemik diterjemahkan oleh *intervening variable* yang terlibat seperti persepsi pembuat keputusan dan struktur domestik negara. Mereka melihat bahwa tindakan pemimpin dunia dibatasi oleh politik domestik dan internasional.<sup>26</sup>

Artinya pengaruh dari struktur internasional tidak serta merta langsung mempengaruhi unit, namun harus didasarkan pada *relative power* atau kapabilitas (ekonomi, sosial, sumber daya alam dan militer) dari negara dan juga karakter

---

<sup>26</sup> Gideon Rose. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy". World Politics , Vol. 51, hal. 151

internalnya yang mempengaruhi penilaian pemimpin terhadap ancaman dan peluang dalam dunia internasional serta diplomasi aktual, militer, dan kebijakan ekonomi luar negeri yang ingin dicapai. kebijakan luar negeri dibentuk oleh pemimpin politik dan elit yang mendasarkannya pada persepsi terhadap *relative power* dari berbagai sisi bukan hanya kapasitas militernya.<sup>27</sup>

Selanjutnya, Realisme Neoklasik berpendapat bahwa ketika negara mengalami peningkatan *relative material power* maka negara akan memberi pengaruh lebih ke luar negeri atau lingkungan eksternalnya (mencari pengaruh yang lebih besar di luar negeri). Namun, para elit tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan sumber daya negerinya. Analisis kapabilitas ini pun harus menguji kekuatan dan struktur negara yang bersangkutan dengan masyarakatnya.<sup>28</sup>

Dengan kata lain, *relative material power* merupakan faktor utama pemahaman para pengambil keputusan terhadap tekanan sistemik sebagai faktor eksternal yang mendorong pemimpin untuk mengambil kebijakan tertentu. Selanjutnya, *intervening variable* atau pengambil kebijakan khususnya presiden atau pemerintah akan didasarkan pada kapabilitas dan hubungannya dengan negara lain.

### 1.7.2 Faktor Internal

Pengambil kebijakan adalah faktor internal yang diasumsikan realisme neoklasik sebagai faktor penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri (*dependent variable*).<sup>29</sup> Faktor internal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan

---

<sup>27</sup> Gideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy", *World Politics*, vol. 51, Hal. 145

<sup>28</sup> Gideon Rose, hal. 147

<sup>29</sup> Gideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy", hal. 147

luar negeri adalah struktur domestik sebuah negara, konsensus elit (*elite consensus*) dan kerapuhan pemerintah/rezim (*government/regime vulnerability*).

## 1. Struktur Domestik

Struktur domestik menjadi hal yang signifikan untuk dipertimbangkan suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Adapun yang menjadi fokus dalam melihat politik domestik suatu negara adalah kondisi rezim yang sedang berkuasa di negara tersebut. Struktur domestik sebuah negara baik struktur ekonomi maupun politik yang dapat menentukan tingkah laku negara, juga tidak kalah penting.<sup>30</sup> dalam melihat sebuah rezim disuatu negara, maka juga akan memperhatikan struktur yang ada di dalam politik domestiknya. Struktur kemudian akan berkenaan dengan proses regulasi pembuatan sebuah kebijakan dalam suatu negara. Sebagai contoh adalah di dalam pengesahan sebuah kebijakan luar negeri, tentunya melewati badan legislatif di dalam negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa, kebijakan luar negeri bisa saja tidak diimplementasikan ketika struktur pemerintahan dalam negeri sebagai aktor politik domestik tidak menyetujuinya. Selain struktur, politik domestik juga identik dengan konsep *distribution of power*. Kedua aspek inilah yang mempengaruhi aktor-aktor domestik untuk melakukan aksi yang nantinya akan berpengaruh kepada pola kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>31</sup>

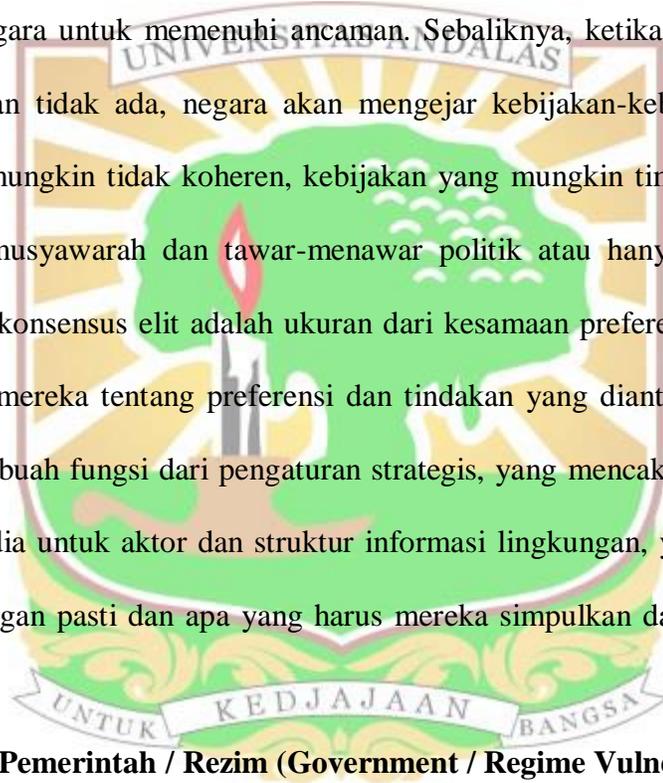
## 2. Konsensus Elit (*Elite Consensus*)

---

<sup>30</sup> Fareed Zakaria, Realism and domestic Politics: A Review Essay, International Security, no. 17, (Summer 1992), United States: The MIT Press, pp. 177-198.

<sup>31</sup> Hudson, Valerie M. (2014). Foreign Policy Analysis, Classic and Contemporary Theory, Rowman & Littlefield; Ch.5. pp.141-160.

Konsensus atau ketidaksepakatan elit adalah penyebab paling langsung dari respons suatu negara atau tidak menanggapi ancaman eksternal. Dengan demikian, konsensus elit adalah variabel dependen: ketika ada konsensus di antara pembuat kebijakan elit untuk menyeimbangkan, negara akan melakukannya. Satu-satunya pertanyaan adalah terhadap siapa apakah akan seimbang dan apakah rintangan mobilisasi yang diciptakan oleh fragmentasi sosial dan kerentanan rezim membatasi kemampuan negara untuk memenuhi ancaman. Sebaliknya, ketika konsensus untuk menyeimbangkan tidak ada, negara akan mengejar kebijakan-kebijakan lain yang mungkin atau mungkin tidak koheren, kebijakan yang mungkin timbul dengan hati-hati melalui musyawarah dan tawar-menawar politik atau hanya secara default. Secara khusus, konsensus elit adalah ukuran dari kesamaan preferensi elit atas hasil dan keyakinan mereka tentang preferensi dan tindakan yang diantisipasi dari orang lain. Ini juga sebuah fungsi dari pengaturan strategis, yang mencakup tindakan yang dirasakan tersedia untuk aktor dan struktur informasi lingkungan, yaitu aktor dapat mengetahui dengan pasti dan apa yang harus mereka simpulkan dari perilaku orang lain.<sup>32</sup>



### **3. Kerapuhan Pemerintah / Rezim (Government / Regime Vulnerability)**

Dalam pengertiannya yang paling mendasar, konsep kerentanan pemerintah atau rezim menanyakan tentang apakah para elit pemerintahan menghadapi tantangan serius dari militer, partai-partai politik yang berseberangan, atau kelompok politik

---

<sup>32</sup> David A. Lake and Robert Powell, eds., *Strategic Choice and International Relations*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1999).

kuat lainnya di masyarakat. Konsep kerentanan pemerintah atau rezim berusaha untuk menangkap hubungan antara penguasa dan memerintah pada saat tertentu.<sup>33</sup>

Para pemimpin, terutama yang rentan, tidak bisa begitu saja memilih kebijakan keamanan berdasarkan kemungkinan mereka menetralsisir ancaman eksternal atau memuaskan ambisi nasional untuk kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar. Mereka juga harus mempertimbangkan biaya domestik yang melekat pada opsi kebijakan.<sup>34</sup> Pemimpin yang rentan biasanya akan lebih dibatasi daripada yang populer, dan mereka akan kurang efektif dalam memobilisasi sumber daya dari masyarakat. Seperti yang diamati James Morrow: “Para pemimpin dan kelompok domestik sering tidak setuju tentang respons yang pantas terhadap ancaman. Para pemimpin memilih kebijakan karena kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman dan untuk memberikan dukungan domestik.”<sup>35</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada kerangka konseptual yaitu perspektif Realisme, terdapat dua faktor yang menjelaskan konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat, yaitu faktor eksternal berupa struktur internasional dan distribution of power serta faktor internal berupa struktur politik domestik, *elite consensus*, dan *government / regime vulnerability* dimana adanya tekanan sistemik yang berkaitan dengan posisi Mesir dalam sistem internasional

---

<sup>33</sup> Randall L. Schweller, *Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing*, *International Security*, Volume 29, number 2, Fall 2004, pp 159-201, The MIT Press, hal. 173

<sup>34</sup> Randall L. Schweller, hal. 174

<sup>35</sup> James D. Morrow, “Arms versus Allies: Trade-Offs in the Search for Security,” *International Organization*, Vol. 47, No. 2 (Spring 1993), hal. 216.

maupun keadaan *relative power* Mesir yang kemudian ditafsirkan atau diterjemahkan oleh *dependent variabel* di unit domestik yaitu para *policy maker* di Mesir.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau proses yang melibatkan berbagai teknik dan perangkat yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengujian data serta serta evaluasi teoritis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *causal explanation*, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati.<sup>36</sup> Penelitian ini akan memakai metode kualitatif dalam memverifikasi hipotesa yang telah ditetapkan oleh penulis.

Metode penelitian bermanfaat bagi penelitian agar penelitian ini tetap konsisten pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu ataupun laporan-laporan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber data yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, ataupun dokumen resmi yang diterbitkan oleh pihak-pihak kredibel.<sup>37</sup>

### 1.8.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi objek kajian yang akan dibahas pada Kebijakan Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Muhammad Mursi. Penelitian ini membatasi penulisan hanya pada bagaimana hubungan antara Mesir dengan Amerika Serikat dalam kerangka kebijakan luar negeri yang diambil oleh

---

<sup>36</sup> U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 26.

<sup>37</sup> Kenneth D Bailey, *Methods of Social Research* (New York: Free Press, 1994), 293

Presiden Muhammad Mursi pada tahun 2012 saat Presiden Mursi mulai memimpin Mesir hingga tahun 2013 masa akhir kepemimpinan Muhammad Mursi sebagai Presiden Mursi.

### **1.8.2. Tingkat Analisis**

Dalam penelitian di bidang Hubungan Internasional, tingkatan analisis (*level of analysis*) adalah unsur yang sangat penting. Penelitian terhadap obyek yang persis sama bisa saja menghasilkan keluaran dan penemuan berbeda apabila dilakukan di tingkatan analisis yang berbeda pula. Oleh karena itu, menetapkan tingkatan analisis sangatlah penting agar hasil penelitian akurat.

Menentukan tingkatan analisis harus didahului dengan menentukan unit analisis dan unit eksplanasi.<sup>38</sup> Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dianalisa atau disebut juga variabel dependen. Sementara unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga sebagai variabel independen. Dengan demikian, dalam melakukan analisa suatu masalah, unit analisis dan unit eksplanasi menjadi saling terkait.

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Kebijakan Luar Negeri negara Mesir pada masa kepemimpinan Muhammad Mursi dengan level analisis berada di sistem internasional. Adapun yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Amerika Serikat. Penelitian ini juga menggambarkan pola hubungan dua negara yaitu Mesir dan Amerika Serikat.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>38</sup> Mochtar Masoed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990) Hal 35-39

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Data sekunder penulis dapatkan melalui studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, dan dokumen yang terkait dengan isu penelitian. Sumber-sumber yang dikumpulkan selain merupakan penelitian terdahulu dengan topik kajian yang mirip, juga merupakan diskursus-diskursus penunjang yang meskipun tidak berkaitan langsung dengan objek kajian dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pisau-pisau analisis penelitian.

Penelitian ini membahas mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberitaan berbagai media massa tentang kebijakan yang dimaksud seperti situs berita *Aljazeera.com*, *Republika.co.id*, *The Guardian.com*, *bbc.co.uk*, *Huffingtonpost.com* dan situs berita resmi lainnya. Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari tulisan-tulisan dari para praktisi dan akademisi, pengumuman atau pernyataan resmi dari pembuat kebijakan, penjelasan, dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dan kritik yang muncul. Adapun data yang ingin diakses melalui sumber ini adalah data yang berhubungan dengan kata kunci seperti “*Egypt’s Foreign Policy Under Mohamed Morsi*”, “*Egypt Foreign Policy After Revolution 2011*”, “*Morsi’s Foreign Policies Core*”.

Data yang penulis cari dalam mendukung penelitian ini diantaranya adalah:

- 1) Data tentang perekonomian Mesir pada tahun 2011-2012 yang didapatkan melalui Central Bank of Egypt, Economic Review yang diakses melalui [www.cbe.org.eg](http://www.cbe.org.eg), jurnal *Arab Spring future challenges: evidence from Egypt, Review of Economics and Political Science* Vol. 3 No. 2, 2018 yang ditulis oleh Doaa Salman Abdou dan Zeinab Zaazou
- 2) Data tentang kondisi militer Mesir yang didapatkan melalui Global Firepower, The Center for Arms Control and Non-Proliferation, diakses melalui <http://www.businessinsider.com/the-worldsmost-powerful-militaries-2012>
- 3) Data-data yang berhubungan dengan kondisi domestik Mesir, hubungan Mesir dan Arab Saudi pasca Arab Spring, posisi Mesir yang berperan sebagai Negara penyangga di Timur Tengah yang didapatkan melalui jurnal-jurnal dan artikel yang membahas mengenai kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti jurnal yang ditulis oleh Bárbara Azaola Piazza dengan judul *The foreign policy of post-Mubarak Egypt and the strengthening of relations with Saudi Arabia: balancing between economic vulnerability and regional and regime security*, artikel yang ditulis oleh Grimm, J. & Roll, S dengan judul *Egypt Foreign Policy under Mohammed Morsi* yang diakses melalui <http://www.swp-berlin.org/en/publications/swp-comments-en/swp-aktuelle>.

#### **1.8.4 Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh melalui penjabaran kalimat untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam mengolah data, penulis akan memilah informasi yang didapatkan secara relevan dan dapat digunakan sesuai dengan isu yang diteliti. Selanjutnya, setelah penulis mendapatkan data-data

yang relevan tersebut, penulis akan menyusun data-data tersebut menjadi pengetahuan yang terstruktur sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Mengumpulkan Data

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Mesir dengan menggunakan studi pustaka untuk mencari data tertulis yang mengacu pada kasus, beberapa literatur, surat kabar dan segala jenis informasi dari internet. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan struktur internasional Mesir, kondisi militer Mesir tahun 2012, kondisi perekonomian Mesir pasca revolusi tahun 2011, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### 2. Aplikasi Kerangka Konseptual

Data yang telah diperoleh kemudian diaplikasikan dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah perspektif Realisme Neoklasik. Dalam perspektif realisme neo-klasik terdapat dua faktor yang menyebabkan konsistensi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Amerika Serikat, yaitu faktor eksternal berupa posisi Mesir dalam sistem internasional dan distribution of power serta faktor internal berupa kondisi politik domestik Mesir dan karakter kepemimpinan elit Mesir.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini penulis akan melakukan penarikan kesimpulan mengenai

kebijakan yang dikeluarkan oleh Mesir pada masa kepemimpinan Presiden Muhammad Mursi yang memilih untuk tetap berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Pada tahap terakhir penulis memverifikasi temuan dari penelitian ini dengan fakta aktual dari kebijakan Mesir terhadap Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Muhammad Mursi.

### **Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini membahas mengenai proposal secara keseluruhan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

#### **Bab II Hubungan Bilateral Mesir - Amerika Serikat**

Bab ini membahas mengenai hubungan bilateral Mesir dan Amerika Serikat pada masa kolonial, masa kepemimpinan Presiden Gamal Abdel Naser, masa kepemimpinan Presiden Anwar Sadat, hingga masa kepemimpinan Presiden Husni Mubarak.

#### **BAB III PERAN SCAF DAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM POLITIK MESIR**

Bab ini membahas mengenai peran SCAF dalam mengambil alih pemerintahan transisi Mesir pasca berakhirnya kekuasaan Mubarak pasca revolusi tahun 2011 dan peran Ikhwanul Muslimin dalam merumuskan kebijakan politik domestik dan kebijakan luar negeri Mesir serta pandangan Ikhwanul Muslimin terhadap Barat.



## **Bab IV Analisis Kebijakan Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Muhammad Mursi**

Bab ini menjelaskan analisis Kebijakan Luar Negeri Mesir Terhadap Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Muhammad Mursi

## **Bab V Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.

